

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Penelitian

Perkembangan dan persaingan dunia organisasi dewasa ini semakin ketat sehingga diperhatikan cukup besar pada praktik sistem akuntansi terutama yang dimotori oleh organisasi ataupun lembaga pemerintah jika dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Pemerintah pusat ataupun daerah mempunyai rencana-rencana yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas negara diantaranya adalah merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk anggaran.

Proses penganggaran yang dilakukan dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yang dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk pelaporan anggaran merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 103).

Menurut Bastian (2006) anggaran merupakan rencana operasi

keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran adalah rencana yang terinci dalam suatu periode tertentu dan dinyatakan secara resmi dalam bentuk yang kuantitatif, biasanya menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk satuan uang.

Dalam proses penganggaran sektor publik khususnya organisasi pemerintahan daerah, manajemen tingkat atas hingga manajemen tingkat bawah terlibat secara langsung dalam penyusunan suatu anggaran dalam kurun periode tertentu. Bagi setiap orang yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan tersebut anggaran akan mempunyai suatu akibat langsung yang akan dirasakan terhadap perilaku manusia. Perilaku- perilaku yang timbul bisa bersifat positif dan negatif. Jika perilaku yang muncul bersifat positif maka visi dan misi organisasi bisa berjalan dengan seimbang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Sebaliknya jika perilaku manusia bersifat negatif maka bisa menimbulkan *budgetary slack* (Warindrani, 2006: 99).

Anggaran merupakan alat pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schieff dan Lewin, Welsch, Hilton dan Gordon dalam Ikhsan (2007:2)). Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian jika dalam penyusunannya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Agar proses penyusunan anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, maka proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan rasa *sense of commitment* bagi penyusun. Apabila tidak berhasil,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka anggaran hanya sekedar rencana belaka tanpa ada rasa tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan realisasi dengan anggaran.

Menurut Syakhroza dalam Shinta (2006), penelitian tentang anggaran telah berkembang terkait dengan berbagai bidang diantaranya ekonomi, psikologi, sosial dan politik. Penelitian tentang perilaku anggaran banyak mengacu pada premis Argyis tentang penganggaran partisipatif (*participative budgeting*) yang kebanyakan entitas mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah di atas yakni sistem penganggaran partisipatif (*participative budgeting*). Secara empiris ditemukan bahwa partisipasi dalam penganggaran memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku kinerja manajerial (Kunwaviyah, 2010).

Partisipasi dalam penganggaran merupakan variabel yang banyak dihubungkan dengan *budgetary slack* dan ditemukan terdapat pengaruh yang tidak konsisten. Dunk dan Perera dalam Rudy dan Wahyu (2013) menduga sebenarnya bukan partisipasi dalam penganggaran atau asimetri informasi yang mempengaruhi *budgetary slack* tetapi faktor personal dari pembuat anggaran itu sendiri. Dalam penelitian Rudy dan Wahyu (2013) menjelaskan bahwa penelitian terdahulu menurut Blanchette, et, al (2002) menemukan bahwa bawahan menganggap *budgetary slack* berpengaruh positif, sehingga bawahan cenderung untuk menaikkan *budgetary slack*. Menurut Warindrani dalam I Made Bagas, I Made Pradana dan Ni Luh Gede (2014), bahwa bagi setiap orang yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan tersebut



anggaran akan mempunyai suatu akibat langsung yang akan dirasakan terhadap perilaku manusia. Perilaku-perilaku yang timbul bisa bersifat positif dan negatif. Jika perilaku yang muncul bersifat positif maka visi dan misi organisasi bisa berjalan dengan seimbang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Sebaliknya jika perilaku manusia bersifat negatif maka bisa menimbulkan *budgetary slack*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya disinyalir karena tidak ada hubungan langsung yang sederhana antara kapasitas personal (individu) dengan *budgetary slack*. Menurut Govindarajan dalam Shinta (2006), untuk merekonsiliasi hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, diperlukan pendekatan kontinjensi dan upaya untuk mengevaluasi faktor-faktor kondisional yang kemungkinan menyebabkan anggaran menjadi efektif. Pendekatan ini memberikan gagasan bahwa sifat hubungan antara kapasitas individu dengan *budgetary slack* memang berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya. Kondisi inilah yang mendorong penelitian sebelumnya oleh Shinta (2006) untuk memasukkan variabel *locus of control* sebagai variabel kontinjensi, yang diharapkan dapat menjelaskan ketidakkonsistenan temuan diatas.

Keberadaan *locus of control* dalam penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan penelitian Shinta (2006) dan Rudy&Wahyu (2013) yang telah membuktikan bahwa kapasitas individu berpengaruh positif terhadap *budgetary slack* dengan *locus of control* sebagai variabel pemoderasi. Kapasitas individu berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Oleh karena itu, dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



budgetary slack, manajer menjadi lebih kreatif bebas melakukan aktivitas operasionalnya, sehingga mampu mengantisipasi adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Penelitian inipun akan berusaha membuktikan pengaruh faktor personal yang difokuskan pada kapasitas individu dengan keberadaan *budgetary slack* dengan mempertimbangkan munculnya perilaku individu yaitu *locus of control* dan budaya paternalistik.

Penelitian ini akan menggunakan obyek Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini sejalan dengan pendapat Moore, et. al dalam Rudy dan Wahyu (2013) bahwa fenomena *budgetary slack* bisa terjadi pada tiap jenis organisasi. SKPD dipilih karena memiliki proses penyusunan anggaran yang jelas antara atasan dan bawahannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan transfer, Anggaran Tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp. 142.371.009.722,25. “Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2015, meliputi Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1,72 triliun terealisasi sebesar Rp 1,46 triliun atau 84 persen, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp 5,5 miliar terealisasi sebesar Rp 3,58

miliar atau 65,58 persen dan Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp 800 juta tidak terealisasi”, tutur Bupati Wardan.

Selanjutnya, Realisasi Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp 528,5 miliar. Bila dibandingkan dengan Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 436,2 miliar terjadi kenaikan sebesar Rp 92,3 miliar atau 17 persen. Dengan jumlah Pembiayaan Netto sebesar tersebut di atas, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 3,86 miliar. (Senuju.com)

Realisasi Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 dinilai kalangan dewan masih cukup rendah. Realisasi APBD Inhil tahun 2014 hanya 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp. 529 miliar lebih. Akibat rendahnya serapan APBD Kabupaten Inhil, angora DPRD Inhil meminta agar Kepala Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkab Inhil yang tidak mampu untuk menjalankan program di SKPD yang dipimpinnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jika memang Kepala SKPD yang tidak mampu melakukan pekerjaannya lebih baik mengundurkan diri untuk diganti dengan yang lebih baik demi percepatan pembangunan Inhil” kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sinrang. (Tribunpekanbaru.com)

Fenomena yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu saat Badan Penyelidik Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan

Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderating lainnya yaitu budaya paternalistik, karena berdasarkan penelitian oleh Apriwandi (2012) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara kapasitas individu dengan *budgetary slack* dengan menggunakan budaya paternalistik. Hasil penelitian ini mampu membuktikan bahwa budaya paternalistik dan *budgetary slack* berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KAPASITAS INDIVIDU YANG DIINTERAKSIKAN DENGAN *LOCUS OF CONTROL* DAN BUDAYA PATERNALISTIK TERHADAP *BUDGETARY SLACK*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kapasitas individu berpengaruh terhadap *budgetary slack* ?
2. Apakah kapasitas individu berpengaruh terhadap *budgetary slack* manajer pembuat anggaran dengan *locus of control* sebagai variabel *moderating*?
3. Apakah kapasitas individu berpengaruh terhadap *budgetary slack* manajer pembuat anggaran dengan *budaya paternalistik* sebagai variabel *moderating*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas individu terhadap *budgetary slack*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas individu terhadap *budgetary slack* manajer pembuat anggaran dengan *locus of control* sebagai variabel *moderating*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas individu terhadap *budgetary slack* manajer pembuat anggaran dengan *budaya paternalistik* sebagai variabel *moderating*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat postif bagi :

1. Akademisi/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama berkaitan dengan kapasitas individu yang diinteraksikan dengan *locus of control* dan budaya paternalistik.
2. Peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para manajer restoran mengenai kapasitas individu yang diinteraksikan dengan *locus of control* dan budaya paternalistik terhadap *budgetary slack*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan *budgetary slack*, kapasitas individu, *locus of control* dan budaya paternalistik serta teori dalam islam, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan model penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk meneliti selanjutnya.

